

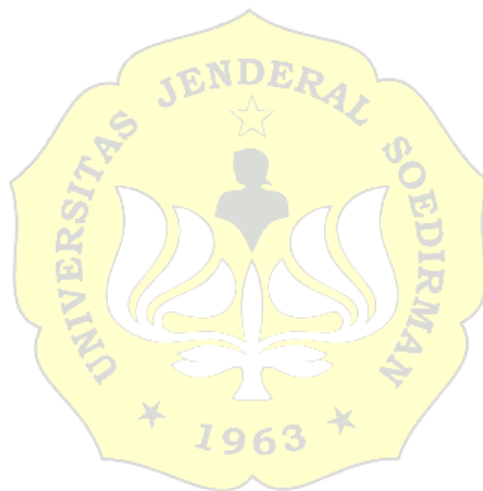
RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Politisasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Pemilu Tahun 2024 di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga”. Peneliti menemukan hal-hal yang bersifat empirik yang diperoleh di lapangan yang mengarah pada politisasi bantuan sosial PKH. Peneliti menemukan adanya petunjuk awal yakni laporan mengenai politisasi bantuan sosial PKH berbentuk penempelan stiker pada rumah penerima manfaat PKH. Selain itu, adanya informasi yang diperoleh peneliti mengenai ancaman yang ditujukan kepada penerima manfaat PKH dari kubu salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden jika tidak memilih pasangan tersebut pada pemilu 2024, maka bantuan sosial PKHnya akan hilang.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bentuk politisasi bantuan sosial PKH pada pemilu tahun 2024, praktik politisasi bantuan sosial PKH pada pemilu tahun 2024, dan aktor yang berperan dalam politisasi bantuan sosial PKH pada pemilu tahun 2024. Penelitian ini mengungkap serta mendalami fenomena yang dialami oleh para penerima manfaat PKH pada pemilu 2024, maka metodologi yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Sasaran penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama dari penelitian ini adalah para penerima manfaat PKH. Informan pendukung dari penelitian ini adalah tim sukses dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, perangkat desa, dan anggota sipil pemerintah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemrosesan satuan, kategorisasi, dan penafsiran data. Metode validasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data.

Hasil penelitian ini menemukan dua bentuk politisasi bantuan sosial PKH yang dialami oleh para penerima manfaat PKH, yakni politisasi bantuan sosial PKH dalam bentuk verbal dan non verbal. Politisasi bantuan sosial PKH dalam bentuk verbal ditemukan adanya pemaksaan pendataan identitas pribadi seperti KTP milik informan dan pengancaman untuk memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Politisasi bantuan sosial dalam bentuk non verbal yakni adanya permintaan penempelan stiker pada setiap rumah para penerima manfaat PKH. Selain itu, kehadiran video kampanye di media sosial seperti YouTube yang menonjolkan program bantuan sosial PKH. Praktik politisasi bantuan sosial PKH, ditemukan adanya penggunaan nama pribadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 dengan mengkaitkan dengan bantuan sosial PKH. Selain itu adanya labelisasi seperti keinginan untuk melabeli rumah para penerima manfaat PKH menggunakan stiker. Aktor politisasi bantuan sosial PKH merupakan tim sukses dari ketiga calon presiden dan wakil presiden.

Dampak politisasi bantuan sosial PKH ini tidak hanya merugikan para penerima manfaat PKH, tetapi juga merusak demokrasi dan pergeseran nilai dari program bantuan sosial PKH. Penelitian menunjukkan adanya kerentanan akan adanya politisasi pada penerima manfaat PKH, namun ditemukannya resistensi dari para penerima manfaat PKH terkait politisasi dapat disimpulkan bahwa tidak semua penerima manfaat PKH yang kerap kali dianggap sebagai masyarakat rentan dapat dipolitisasi, penerima manfaat PKH mulai memiliki kesadaran kritis mengenai politisasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi untuk mencegah politisasi bantuan sosial PKH dalam pemilu di masa mendatang yakni dengan memberikan pemberdayaan politik bagi para penerima manfaat PKH, agar dapat meningkatkan literasi politik dan kemampuan dalam menyikapi politisasi bantuan sosial PKH secara lebih bijak.



SUMMARY

This study, entitled "Politicization of Family Hope Program (PKH) Social Assistance in the 2024 Election in Kedungjati Village, Bukateja District, Purbalingga Regency," found empirical evidence in the field that points to the politicization of PKH social assistance. The researchers found initial clues, including reports of the politicization of PKH social assistance in the form of stickers attached to the homes of PKH beneficiaries. Furthermore, the researchers obtained information regarding threats directed at PKH beneficiaries from the camp of one of the presidential and vice-presidential candidates: if they do not vote for the pair in the 2024 election, their PKH social assistance will be lost.

This study aims to describe and explain the politicization of the Family Hope Program (PKH) social assistance program in the 2024 elections, the practice of politicizing PKH social assistance programs in the 2024 elections, and the actors involved in the politicization of PKH social assistance programs in the 2024 elections. This study uncovers and explores the phenomena experienced by PKH beneficiaries in the 2024 elections. Therefore, the methodology used is descriptive qualitative research. The research targets consist of primary and supporting informants. The primary informants are PKH beneficiaries. Supporting informants include the campaign teams of the presidential and vice-presidential candidates, village officials, and civil servants. Data collection methods in this study include in-depth interviews, observation, and documentation studies. Data sources for this study come from primary and secondary data. The data analysis methods used in this study include unit processing, categorization, and data interpretation. The data validation method used in this study is data triangulation.

This study identified two forms of politicization of the Family Hope Program (PKH) social assistance program experienced by PKH beneficiaries: verbal and non-verbal politicization of PKH social assistance. Verbal politicization of PKH social assistance included coercion into personal identity data collection, such as the informant's ID card (KTP), and threats to vote for a particular presidential and vice-presidential candidate. Non-verbal politicization of social assistance included requests to place stickers on the homes of PKH beneficiaries. Furthermore, campaign videos on social media platforms like YouTube highlighted the PKH social assistance program. The politicization of PKH social assistance involved the use of the personal names of presidential and vice-presidential candidates in the 2024 election in association with PKH social assistance. Furthermore, labeling practices included the desire to label PKH beneficiaries' homes with stickers. The actors involved in the politicization of PKH social assistance were the campaign teams of the three presidential and vice-presidential candidates.

The impact of this politicization of PKH social assistance not only harms PKH beneficiaries but also undermines democracy and shifts the values of the PKH social assistance program. Research shows that there is vulnerability to politicization among PKH beneficiaries, however, the resistance found from PKH beneficiaries regarding politicization can be concluded that not all PKH beneficiaries who are often considered vulnerable communities can be politicized, PKH beneficiaries are starting to have critical awareness regarding politicization. Therefore, this study recommends a strategy to prevent the politicization of PKH social assistance in future elections, namely by providing political empowerment for PKH beneficiaries, in order to increase political literacy and the ability to respond to the politicization of PKH social assistance more wisely.

